

**MANAJEMEN PEMERINTAHAN DINAS PARIWISATA DALAM PEMBANGUNAN
WISATA SEJARAH DI KABUPATEN SIAK 2016-2017**

Oleh : Nugraha Dhanasyah Putra

Email: dana10sen@gmail.com

Dosen Pembimbing : Rury Febrina, S.IP, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru

Abstract

The research entitled "Government Management of the Tourism Office in the Development of Historical Tourism in Siak Regency 2016-2017" This research is based on the Siak Regency Regional Regulation Number 13 of 2012 concerning the Regional Tourism Development Master Plan (RIPPDA) of Siak Regency Article 13 activities that "Tourism Strategic Areas I for the development of tourism products based on historical and cultural heritage tourism supported by culinary tourism in one unit, the development of "History and Culture" tourism in the coverage of Siak District ". Siak District is the focus of tourism in the historical and cultural tourism sector, therefore every historical tourism object in Siak District is the main focus of management by the Siak Regency Tourism Office. as for the formulation of the problem in this study is "How the Governance of the Siak Regency Tourism Office in Historical Tourism Development"

The method used in this research is a qualitative method which describes the data descriptively. The data techniques used were interviews and documentation. While the data source used is primary data obtained from the research location in the form of research information and then support secondary data in the form of document data.

The results showed that the management of historical tourism objects in the Siak Regency Tourism Office was good in historical tourism objects. Three indicators that go well are planning, monitoring, organization, while what is not good is the implementation, therefore it is necessary to improve in order to increase tourists and services to historical tourism in Siak district. It is undeniable that other indicators have also increased.

Keywords: Tourism, Government Management, Historical Tourism

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki beragam potensi, baik potensi Sumber Daya Alam (SDA) maupun potensi akan keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan kekayaan SDA yang terkandung didalamnya baik dari sektor minyak bumi dan gas (Migas) maupun pada tempat-tempat yang memiliki daya tarik untuk dikunjungi oleh orang banyak. Tempat-tempat yang menarik tersebut jika dikelola oleh pemerintah yang bersangkutan akan dapat menghasilkan keuntungan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah daerah yang menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mencerminkan telah berfungsinya otonomi daerah yang merupakan buah dari desentralisasi, desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah untuk menjalankan pemerintahannya yang diatur menurut Undang-Undang dan ditujukan untuk dapat mengelola serta menghasilkan keuntungan bagi daerah tersebut.

Tugas pembantuan daerah tersebut menjadikan daerah memiliki kewenangan di beberapa sektor yang dimiliki oleh daerah tersebut untuk dikembangkan, salah satu sektor yang dapat dikembangkan adalah disektor pariwisata. Sektor pariwisata menjanjikan keuntungan yang banyak yang akan diperoleh daerah jika daerah tersebut dapat mengelola sistem kepariwisataan dengan baik, pengelolaan sistem kepariwisataan nantinya akan berbanding lurus terhadap peningkatan kunjungan wisatawan ke tempat-tempat objek wisata di daerah tersebut.

Sejak Undang-Undang tentang Otonomi Daerah dilaksanakan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terus berusaha mengembangkan kepariwisataan dalam meningkatkan penerimaan devisa, memperluas lapangan kerja, dan memperkenalkan kebudayaan. Pembinaan serta pengembangan pariwisata dilakukan dengan tetap memperhatikan

terpeliharanya kebudayaan dan kepribadian nasional. Untuk itu perlu diambil langkah-langkah dan pengaturan-pengaturan yang terarah yang berdasarkan kebijakan yang terpadu antara lain dibidang promosi, penyediaan fasilitas serta kelancaran mutu dan kelancaran pelayanan. Salah satu pendongkrak pembangunan di Indonesia adalah di bidang pariwisata.

Secara umum pariwisata dipandang sebagai sektor yang dapat mendorong dan meningkatkan kegiatan pembangunan daerah. Memasuki era globalisasi peranan industri pariwisata harus didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan juga profesional. Menurut Irawan (2010:11) kepariwisataan adalah keseluruhan jaringan dan gejala-gejala yang berkaitan dengan tinggalnya orang asing di suatu tempat, dengan syarat bahwa mereka tidak tinggal ditempat itu untuk melakukan pekerjaan yang penting yang memberikan keuntungan uang bersifat permanen maupun sementara.

Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi wisata adalah Provinsi Riau, Provinsi Riau terdapat kabupaten-kabupaten yang memiliki potensi wisata yang jika dikembangkan dapat menghasilkan pendapatan asli daerah yang cukup menjanjikan, kabupaten-kabupaten tersebut antara lain adalah Kabupaten Rokan Hulu dengan wisata religinya, Kabupaten Bengkalis dengan potensi wisata alamnya, Kabupaten Kampar dengan potensi wisata sejarahnya sampai Kabupaten Siak dengan beragam potensi baik potensi wisata religi maupun wisata sejarahnya. Potensi-potensi wisata di Provinsi Riau tersebut jika dikembangkan dengan baik akan menunjukkan peningkatan baik peningkatan jumlah wisatawan maupun jumlah pendapatan asli daerahnya.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa setiap daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mengembangkan setiap potensi pariwisata yang dimiliki untuk

dikelola serta dapat membawa kebaikan di daerah tersebut baik terhadap pemerintah itu sendiri maupun terhadap masyarakat yang berada disekitar lokasi destinasi wisata.

Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Siak Pasal 13 disebutkan bahwa “Kawasan Strategis Pariwisata I untuk pengembangan produk pariwisata berbasis wisata peninggalan sejarah dan budaya didukung oleh wisata kuliner dalam satu kesatuan, tema pengembangan wisata “Sejarah dan Budaya” cakupan wilayah Kecamatan Siak”, dijelaskan diatas bahwa Kecamatan Siak merupakan fokus pariwisata disektor wisata sejarah dan budaya, maka dari itu setiap objek-objek wisata sejarah di Kecamatan Siak merupakan fokus utama dalam pengelolaan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Siak.

Peningkatan kunjungan wisatawan setiap tahunnya dapat dijadikan indikator bahwa dalam pengelolaan baik itu perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi setiap tahun meningkat lebih baik. Salah satu daerah destinasi wisata yang dapat dikunjungi adalah yang berada di Kecamatan Siak yang merupakan kawasan strategis pariwisata I. Kawasan strategis pariwisata I memiliki beberapa tempat destinasi wisata sejarah yang disebutkan dalam tabel sebagai berikut

Tabel 1. 1 Objek Wisata Sejarah Kabupaten Siak

No.	Nama Objek Wisata	Kecamatan
1.	Istana Siak Sri Indrapura	Siak
2.	Makam Koto Tinggi	Siak

Sumber: Dokumen Destinasi Wisata Sejarah Dinas Pariwisata Kab. Siak 2018

Dari tabel I. 1 dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Siak memiliki objek wisata sejarah dimana wisatawan datang berkunjung memiliki varian objek wisata

sejarah Kabupaten Siak yang dapat dikunjungi. Dapat dikatakan bahwa Kabupaten Siak merupakan daerah yang cukup menjadi perhitungan bagi wisatawan manapun baik lokal, nasional sampai mancanegara untuk datang dan menikmati situs-situs yang menjadi peninggalan sejarah yang pernah berada di Kabupaten Siak. Objek wisata sejarah dapat menjadi destinasi favorit wisatawan jika terus dikembangkan dengan berbagai inovasi dan juga sarana dan prasarana pendukung wisatawan.

Didalam tabel 1. 1 disebutkan bahwa objek destinasi wisata sejarah memiliki karakteristik dan nilai sejarah yang dimiliki dengan rinciannya sebagai berikut:

a. Istana Siak Sri Indrapura

Istana Siak Sri Indrapura merupakan objek wisata sejarah yang paling terkenal di Kabupaten Siak, Istana Siak Sri Indrapura seringkali hanya disebut sebagai Istana Siak. Istana Siak merupakan sebuah istana peninggalan Kerajaan Kesulthanan Siak Sri Indrapura, dibangun oleh sulthan pada saat itu yang bernama Sulthan Syarif Qasim II. Istana Siak didalamnya menyimpan berbagai jenis peninggalan kerajaan seperti Komet, miniatur perkumpulan raja dan petinggi kerajaan sampai alat-alat kerajinan seperti piring, gelas, cermin, mahkota sulthan, singgasana sulthan dan lain-lain.

b. Makam Koto Tinggi

Makam Koto Tinggi merupakan kompleks pemakaman yang didalamnya berisi makam Sulthan Syarif Qasim I beserta para permaisuri dan juga para keluarga dan para pembesar kerajaan pada masa Kerajaan Kesulthanan Siak Sri Indrapura. Letak Makam Koto Tinggi tepat berada didepan Istana Siak. Alasan dibuat Makam Koto Tinggi menurut masyarakat setempat adalah pada zaman Kerajaan Kesulthanan Siak Sri Indrapura para raja-raja tersebut menginginkan agar letak makam para pembesar kerajaan mudah dijangkau ketika raja yang sedang berkuasa ingin melakukan ziarah kemakam tersebut.

Tidak sedikit masyarakat yang datang ke Makam Koto Tinggi, alasan datang ke makam tersebut selain untuk berziarah tetapi juga ingin melihat para pembesar Kerajaan Kesultanan Siak Sri Indrapura yang didalamnya juga terdapat ayah dari Sulthan Syarif Qasim II.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Manajemen Pemerintahan Dinas Pariwisata Kabupaten Siak dalam pembangunan wisata sejarah?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam pengelolaan pembangunan wisata sejarah di Kabupaten Siak?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian judul diatas adalah sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan Manajemen Pemerintahan Dinas Pariwisata Kabupaten Siak dalam pembangunan wisata sejarah
- b. Mendeskripsikan faktor-faktor yang menghambat Manajemen Pemerintahan Dinas Pariwisata Kabupaten Siak dalam pembangunan wisata sejarah

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai :

- a. Secara teoritis
 1. Penelitian ini akan menambah pengetahuan khususnya bagi ilmu Pemerintahan tentang pembangunan wisata sejarah khususnya yang berada di Kabupaten Siak
 2. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang ingin melanjutkan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang sama.

b. Secara praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi atau sebagai bahan evaluasi terhadap pembangunan wisata sejarah oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Siak
2. Bagi penulis, sebagai upaya pemahaman dan pengembangan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.

D. Tinjauan Pustaka

Manajemen adalah suatu kegiatan organisasi, sebagai suatu usaha dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu yang mereka taati sedemikian rupa sehingga diharapkan hasil yang akan dicapai sempurna, yaitu efektif dan efisien. George R. Terry (1958) dalam bukunya *Principles of Management* (Sukarna, 2011:10) membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu Planning (Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Actuating (Pelaksanaan) dan Controlling (Pengawasan).

a. Perencanaan

George R. Terry dalam bukunya *Principles of management* (Sukarna, 2011:10) mengemukakan tentang *planning* Sebagai berikut, yaitu: "Perencanaan adalah pemilih fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan."

Pengorganisasian

a. Pengorganisasian

Pengorganisasian tidak dapat diwujudkan tanpa ada hubungan dengan yang lain dan tanpa menetapkan tugas-tugas tertentu untuk masing-masing unit. George R. Terry dalam bukunya *Principles of management* (Sukarna 2011:38) mengemukakan tentang *organizing* sebagai berikut, yaitu: "Pengorganisasian ialah penentuan,

Pengelompokan dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, Penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan

b. Pelaksanaan

Menurut George R. Terry dalam bukunya *Principles of management* (Sukarna 2011:82) mengatakan bahwa “ Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.

a. Pengawasan

Control mempunyai perananan atau kedudukan yang penting sekali dalam manajemen, mengingat mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja teratur tertib, terarah atau tidak, maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai. Dengan demikian *control* mempunyai fungsi untuk mengawasi segala kegiatan agar tertuju kepada sarannya, sehingga tujuan yang telah di tetapkan dapat tercapai.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu menggambarkan atau menjelaskan permasalahan yang ada dengan memberikan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan Sugiyono (2014:13). Pada penelitian ini realita yang ada dilapangan dijelaskan dengan beberapa fenomena-fenomena yang ada kaitannya dengan penelitian dengan alasan bahwa data dan informasi yang dikumpulkan

dan dijadikan dasar untuk mendeskripsikan.

2. Jenis Data

a. Data primer

Data primer adalah informasi yang di peroleh langsung dari informan yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang di teliti. Data Premier dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara dan dokumentasi yang berhubungan dengan Tata Kelola objek wisata sejarah Kabupaten Siak tahun 2016-2017.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiono 2014:402). Adapun data sekunder berupa laporan, Ketetapan-Ketetapan, Dokumen, Media massa, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan yang dijadikan objek penelitian untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti kepada responden Tata Kelola Dinas Pariwisata dalam Pembangunan Wisata Sejarah di Kabupaten Siak.

Tabel 1. 5 Data Informan Penelitian

N o.	Nama	Jabatan	Juml ah
1.	Dr. H. Fauzi Asni, M.Si	Kadis Pariwisata	1
2.	Arie Darmawan, S.Ip	Kabid Destinasi dan Industri	1

		Pariwisata	
3.	Effendi S.Pd	Kasi Pengelolan Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata	1
4.	Febritama Manila S.T	Kasi Sarana dan Prasarana	1
5.	Junaidi	Pengelola Objek wisata	1
6.	Thoyib, S ukur	Wisatawan	2
Total			7

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berhubungan dengan topik penelitian.

4. Teknik Analisa Data

Sesuai dengan tujuan yang dikemukakan, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan fenomena yang diselidiki.

Metode analisis kualitatif deskriptif merupakan penelitian bukan eksperimen, karena tidak dimaksudkan untuk mengetahui akibat dari suatu perlakuan. Dengan penelitian deskriptif peneliti hanya bermaksud menggambarkan

(mendeskripsikan) atau menerangkan gejala yang terjadi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Manajemen Pemerintahan Dinas Pariwisata dalam Pembangunan Wisata Sejarah di Kabupaten Siak

A. Perencanaan

Menurut Soekartawi (2000) perencanaan adalah pemilihan alternatif atau pengalokasian berbagai sumber daya yang tersedia. Sutarno (2004) juga berpendapat bahwa perencanaan diartikan sebagai perhitungan dan penentuan tentang hal yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, dimana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksana dan bagaimana tata cara mencapai hal tersebut Perencanaan merupakan pondasi dari setiap tujuan dari tercapainya suatu kegiatan atau program yang akan dilaksanakan, dengan pelaksanaan yang matang akan menghasilkan suatu output yang bernama perorganisasian agar ketika pada tahap pelaksanaan dapat terjadinya suatu kerjasama antar semua lini dengan baik, baik kerjasama secara horizontal maupun vertikal. Dalam hal pengelolaan Wisata Sejarah ini tidak lepas dari wujud perencanaan yang nyata dari Dinas Pariwisata Perdagangan Kabupaten Siak. Pada tahap perencanaan yang nyata ini keterlibatan para instansi tidak bisa dilepaskan, karena setiap instansi mempunyai perannya masing-masing. Hal ini berkaitan dengan bagaimana peranan instansi terkait dalam mengelola Wisata Sejarah didapat informasi dari Bapak Febritama Manila S.T selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kabupaten Siak yang menyatakan:

“Disadari bahwa wisata sejarah merupakan wisata unggulan di Kabupaten Siak, maka dari itu kami memfokuskan terlebih dahulu pada perbaikan dan juga peningkatan baik pada infrastruktur dan juga SDM yang terlibat di objek wisata sejarah, di

Istana Siak saya merasa sudah baik tetapi di objek wisata sejarah lainnya contohnya Makam Koto Tinggi saya menilai memang dibutuhkan fasilitas-fasilitas pendukung seperti toilet umum yang belum tersedia dan juga cuman dua orang yang bergantian menggunakan shift ketika melakukan penjagaan wisata sejarah Makam Koto Tinggi, kadang kala penjaga tersebut tidak menyelesaikan jam operasionalnya, ya maklumlah namanya juga honorer, mereka harus mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk menaikkan gaji mereka dinas ini belum cukup kuat untuk menaikkan gaji mereka". (Wawancara dengan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata Kabupaten Siak tanggal 27 Februari 2019)

B. Pengorganisasian

Pengorganisasian pelaksanaan pengembangan wisata sejarah juga tidak memungkinkan hanya dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata semata, dibutuhkan peran dari dinas lain yang saling terintegrasi. Sebagai contoh dalam pelaksanaan pengelolaan wisata sejarah Balai Kerapatan Tinggi Kecamatan Siak membutuhkan kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak. Dua dinas tersebut saling bahu membahu dalam melaksanakan pengembangan wisata sejarah Balai Kerapatan Tinggi. Masyarakat disekitar kawasan objek wisata sejarah juga menempati fungsi strategis dalam pengembangan wisata, masyarakat yang memiliki hubungan dengan objek wisata diatur sedemikian rupa agar dapat terkendali dan terkelola yang secara tidak

langsung berdampak pada kepuasan pelayanan terhadap wisatawan yang berkunjung ke objek tersebut. Contoh kerjasama antara Dinas Pariwisata dengan masyarakat adalah Dinas Pariwisata berinisiatif mengumpulkan dan menata para penjual-penjual disekitar objek wisata, kemudian masyarakat diharapkan dapat berjualan dengan menjaga kebersihan disekitar objek wisata, masyarakat dapat mencari kehidupan disekitar objek wisata sedangkan Dinas Pariwisata mendapat pendapatan dalam bentuk pajak yang diambil dari para penjual-penjual tersebut. Maka dari itu terdapat sistem mutualisme antara Dinas Pariwisata dengan masyarakat. Pengorganisasian yang baik akan menghasilkan pelaksanaan yang baik, pengorganisasian wisata sejarah dapat diketahui melalui wawancara dengan Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Kabupaten Siak sebagai berikut:

"Sistem pengorganisasian baik yang terjadi didalam Dinas Pariwisata itu baik pemerintah, masyarakat maupun stakeholder yang ada disistem pariwisata kab.siak yang sudah tercapai dengan cukup baik, kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengelola beberapa destinasi wisata dan juga kepada masyarakat penjual-penjual makanan dan minuman sekitar objek wisata juga sudah kami kondisikan, penjual yang berada didekat Istana Siak sudah saling konsolidasi untuk saling membantu dalam menjaga disekitar Istana Siak terutama tentang kebersihan. Saya menyadari tidak akan bisa Dinas Pariwisata berjalan sendiri tanpa bantuan dari pihak lain. Satuan

Kerja Dinas Pariwisata sudah terjalin dengan baik saling memberikan pilihan terbaik dalam mensukseskan visi Dinas Pariwisata menjadikan wisata Kabupaten Siak terunggul di Sumatera tahun 2020". (Wawancara dengan Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Siak pada tanggal 4 Februari 2019)

C. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan inti dari sebuah tata kelola, tahapan-tahapan yang telah direncanakan dan telah diorganisir dalam mencapai tujuan akan dieksekusi didalam tahap pelaksanaan. Pelaksanaan dapat dikatakan sebagai citra dari organisasi tetapi tidak mengurangi dari unsur-unsur tata kelola lainnya, dengan pelaksanaan tersebutlah tujuan akan terealisasi, organisasi dengan sebaik-baik mungkin untuk melaksanakan tahapan pelaksanaan agar tahapan-tahapan yang telah dilalui tidak menjadi sia-sia. Pengelola yang berada di setiap objek wisata sejarah tidak selalu berjalan dengan baik, ketika berada di lokasi objek wisata sejarah Makam Koto tinggi diketahui bahwa terdapat dua orang yang memiliki tanggung jawab untuk berada di objek wisata sejarah tersebut dengan sistem kerja bergantian tetapi penulis melihat bahwa pihak pengelola tersebut tidak berada di objek wisata sejarah di jam operasional yang telah ditentukan, maka dengan ini penulis melakukan wawancara dengan pihak pimpinan terkait permasalahan tersebut sebagai berikut:

"Pengelola yang berada di unit objek wisata memiliki kewajiban

untuk tetap berada diobjek tersebut pada batas waktu yang telah ditentukan, terkadang memang pengelola tidak berada ditempat dengan berbagai alasan salah satunya adalah mereka memiliki mata pencaharian lain dikarenakan jika hanya mengandalkan pendapatan sebagai pengelola tidak akan mencukupi. Maka dari itu kami berharap adanya tambahan kompensasi bagi para pengelola tetapi untuk saat ini sulit karena anggaran yang diberikan tidak mencukupi untuk memberikan tambahan tersebut". (Wawancara dengan Kepala Seksi Kawasan Strategis dan Destinasi Wisata pada tanggal Februari 2019)

D. Pengawasan

Pengawasan dimaksudkan sebagai upaya untuk mencegah kemungkinan penyimpangan terhadap perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan yang baik didasari pula oleh adanya perencanaan yang baik. Dalam Pelaksanaan Wisata sejarah, Dinas Pariwisata Kabupaten Siak juga memberikan pengawasan untuk mengetahui apa saja yang menjadi dasar dalam melaksanakan Pelaksanaan Wisata Sejarah tersebut. Dalam pengawasan wisata sejarah Kabupaten Siak ini langsung dikelola dan juga diawasi oleh satuan kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, tetapi setelah itu Dinas Pariwisata juga mendapat pengawasan oleh pihak yang mempunyai wewenang yang lebih tinggi yaitu Kepala Daerah yang dalam hal ini adalah Bupati Siak berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2018 tentang Satuan Organisasi dan Tata Kerja

Kabupaten Siak yang didalamnya menjelaskan bahwa semua program yang terlaksana diawasi oleh Kepala Daerah (Bupati).

Hasil dari pengawasan yaitu berupa evaluasi atau perbaikan dari pihak yang diawasi. Tindakan perbaikan dilakukan apabila, rencana, proses dan hasil kerja terdapat penyimpangan dari yang telah ditentukan, ketika terjadi pelanggaran atau penyimpangan maka akan dilakukan perbaikan. Setiap tahunnya Dinas Pariwisata Kabupaten Siak dinilai dalam pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan didalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP), didalamnya memuat laporan-laporan perkembangan pelaksanaan pertiga bulan, semester bahkan dalam setahunnya.

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan terhadap penelitian yang telah dilaksanakan, Maka peneliti dapat menarik kesimpulan antara lain:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan objek wisata sejarah Dinas Pariwisata Kabupaten Siak sudah baik dalam mengelola objek wisata sejarah. Tiga indikator yang sudah berjalan dengan baik yaitu perencanaan, Pengawasan, Perorganisasian sedangkan yang kurang baik adalah Pelaksanaan maka dari itu perlu ditingkatkan agar terjadinya peningkatan wisatawan dan juga pelayanan terhadap wisata sejarah di kabupaten Siak. Tidak dipungkiri juga

diperlukan peningkatan di indikator yang lainnya.

2. Dinas Pariwisata Kabupaten siak memiliki kekurangan yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia yang berada di beberapa Objek Wisata Sejarah baik dari kualitas maupun kuantitas, Sumber Daya Manusia sangat diperlukan dalam membangun objek wisata sejarah di kabupaten siak. Promosi wisata juga masih sedikit promosi-promosi yang berkaitan dengan wisata sejarah. Promosi Wisata juga merupakan hal yang penting agar informasi dapat diakses baik wisatawan, masyarakat dan stakeholder yang bersangkutan. Kerjasama dengan pihak swasta juga diperlukan agar terjadi sinergitas dalam mengembangkan objek wisata sejarah di Kabupaten Siak.

Saran

Dari kesimpulan diatas maka penulis mencoba untuk memberikan saran yaitu:

1. Dinas Pariwisata seharusnya lebih meningkatkan efektivitas kinerjanya dalam pengelolaan Objek Wisata Sejarah. mempertahankan indikator perencanaan, pengawasan, perorganisasian serta meningkatkan indikator yang belum berjalan dengan baik yaitu indikator pelaksanaan.
2. Melakukan peningkatan kualitas maupun kuantitas Sumber Daya Manusia melalui rekrutmen serta pelatihan yang akan meningkatkan kualitas

Sumber Daya Manusia yang dapat mengarah pada peningkatan pelayan public yang berada di objek wisata Kabupaten Siak. kebutuhan Promosi Wisata Sejarah baik dari media cetak perlu ditingkatkan agar dapat memberikan informasi

kepada masyarakat maupun wisatawan, kerja sama dengan pihak swasta perlu juga ditingkatkan agar wisata sejarah kabupaten siak tidak hanya dimiliki dan dikembangkan Dinas Pariwisata sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gamal. 2004. Dasar-dasar Pariwisata. Penerbit Andi Yogyakarta
- George R. Terry And Leslie W. Rue. 2008 Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta PT Bumi Aksara.
- Alma, Buchari. 2009.
- Harun, Rochajat dan Elvinaro Ardianto. 2011. Komunikasi pembangunan dan perubahan sosial. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Irawan, Koko. 2010. Potensi Obyek Wisata Sebagai Daya Tarik Wisata. Yogyakarta: Kertas Karya
- Subandi. 2011. "Ekonomi Pembangunan (cetakan kesatu)". Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Mulyadi. 2012.
- Torang, Syamsir. 2013. Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya. & Perubahan Organisasi. Alfabeta.
- Todaro, Michael. P. 1997. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga.
- Wardiyanto. 2011. Perencanaan pengembangan pariwisata. Penerbit Lubuk Agung.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Siak
- Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 80 Tahun 2016 tentang Uraian tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Siak